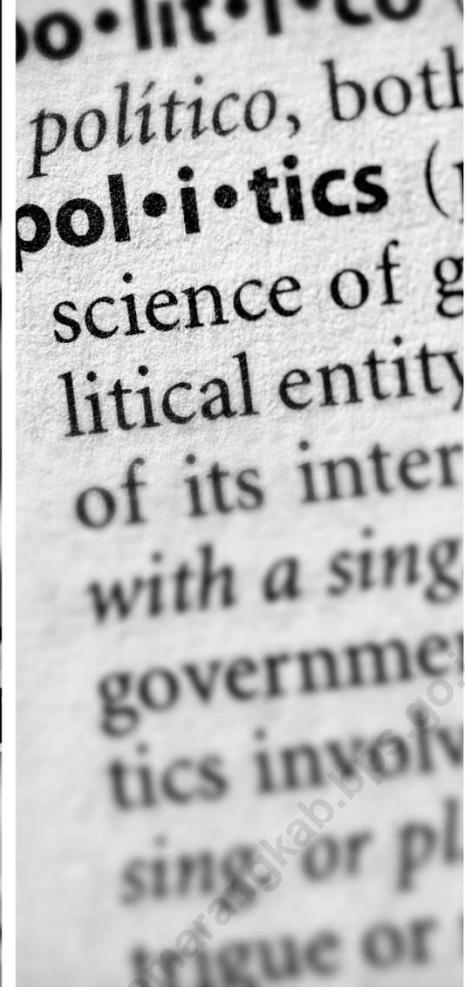


Statistik Politik & Keamanan

KABUPATEN SEMARANG 2021

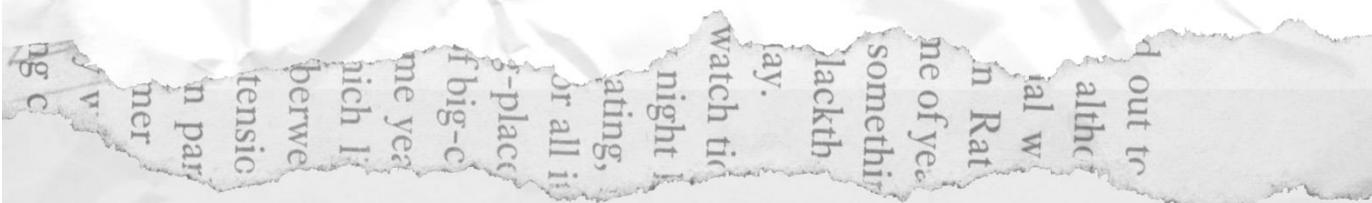


BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG



Statistik Politik & Keamanan

KABUPATEN SEMARANG **2021**



**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN SEMARANG
2021**

Katalog : 4601001.3322

Nomor Publikasi : 33220.2243

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xi + 32

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Dicetak oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ir. Sri Wiyadi, M.M

Penanggung Jawab

Ir. Sri Wiyadi, M.M

Penyunting

Meryanti Sri Wulandari, SST., M.Si.

Pengolah Data & Penulis Naskah

Prasetyo Aji, S.E.

Asfin Iriana, SST.

Lusiana Suryaningsih, S.E.

Penata Letak

Prasetyo Aji, SE

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang melakukan kegiatan statistik mulai dari pengumpulan sampai penyajian dan diseminasi data. Penyajian data berupa publikasi memudahkan pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan data yang ada. Salah satu data yang dikumpulkan BPS Kabupaten Semarang adalah Statistik Politik dan Keamanan.

Statistik Politik dan Keamanan dikumpulkan setiap tahun, dimana data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari dinas atau instansi terkait. Data tahun 2021 diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Semarang. Untuk melengkapi informasi terkait politik dan keamanan, dalam publikasi ini juga menggunakan data proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015). Penyusunan publikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pengguna data khususnya data politik dan keamanan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan data statistik politik dan keamanan bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas.

Ungaran, Desember 2022

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Semarang

Kepala,



Ir. Sri Wiyadi, M.M



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Jenis dan Sumber Data.....	7
2.2. Konsep dan Definisi.....	7
2.3. Penjelasan Teknis.....	9
BAB III KONDISI POLITIK DI KAB SEMARANG	11
3.1. DPRD Kabupaten Semarang.....	13
3.2. Organisasi Masyarakat/LSM	16
BAB IV KONDISI KEAMANAN DI KAB SEMARANG	19
4.1. Penduduk Kabupaten Semarang	22
4.2. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	24
4.3. Tindak Kejahatan di Kabupaten Semarang.....	26
4.4. Korban Kejahatan di Kabupaten Semarang	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2021 menurut Jenis Kelamin.....	13
Gambar 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2021 menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin	14
Gambar 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021	15
Gambar 4. Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021	17
Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021	23
Gambar 6. Persentase Penduduk Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	23
Gambar 7. Jumlah Personil Polisi Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021	24
Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021.....	25
Gambar 9. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Kejahatan Diselesaikan (Crime Cleared) Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kabupaten Semarang menurut Kelompok dan Jenis Kejahatan Tahun 2020-2021	27
Tabel 2. Jumlah Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2021	30

<https://semarangkab.bps.go.id>



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN SEMARANG 2021

INDIKATOR KEAMANAN 2021



1.186 orang

Jumlah polisi 894 orang.
Jumlah penduduk 1.059.844 orang.
Rasio penduduk per polisi 1.186,
artinya satu orang polisi melayani 1.186
orang penduduk



64.98% *Crime Cleared*

163 kasus kejahatan diselesaikan
dari 165 kasus yang dilaporkan



29 jam 52 menit 0 detik

Crime O'Clock

Setiap kurang lebih satu hari
terjadi satu kejahatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam realita politik Indonesia. Distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral di tangan presiden menjadi tuntutan orde reformasi. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat, kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Good Government and Clean Governance*).

Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) melibatkan empat lembaga negara/kementrian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementrian Hukum dan HAM. Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kemustahilan bila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan terhadap munculnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” . Salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini, yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global, dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya harapan masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan/monitoring dan evaluasi. Oleh karena diperlukan alat untuk memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan, yaitu diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang berupaya memenuhi kebutuhan indikator untuk memantau dan memonitor serta mengevaluasi

perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Kabupaten Semarang dengan melakukan kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan yang hasilnya dituangkan melalui publikasi ini. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu. Bagi pemerintah, informasi ini setidaknya dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif dan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan terkait politik dan keamanan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberi gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan masyarakat. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kriminalitas, konflik massal dan peran kepolisian beserta masyarakat dan DPRD dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Semarang 2021 ini menyajikan gambaran politik dan kejadian tindak kejahatan/kriminalitas di Kabupaten Semarang selama tahun 2021.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dari dinas/instansi yang dikumpulkan dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS yang dimaksud adalah proyeksi penduduk berdasarkan data hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015) sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres, DPRD, dan Pemerintah Daerah yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang.

2.2. Konsep dan Definisi

A. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat.

B. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

C. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu

waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

F. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan politik.

G. Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan/criminal atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

H. Peristiwa yang Dilaporkan

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

I. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya adalah :

- a. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

- b. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

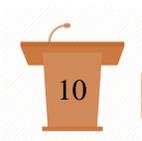
$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$



c. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

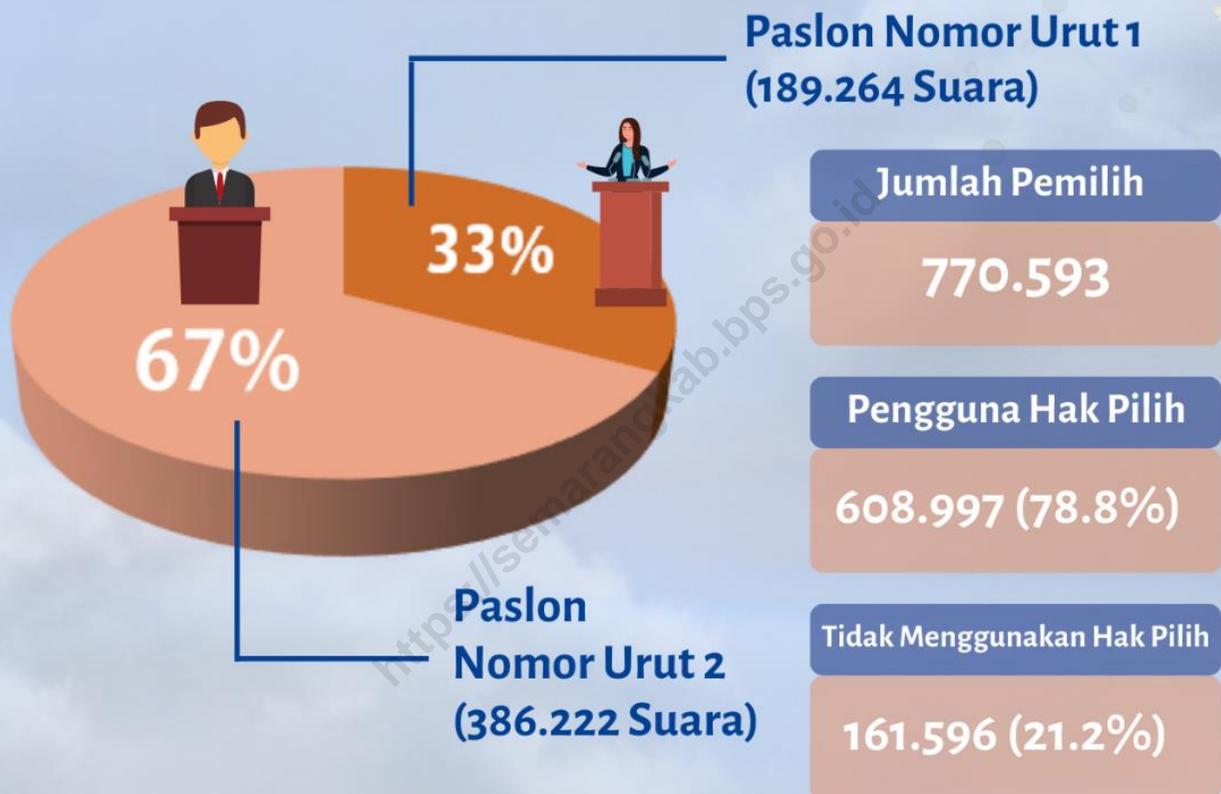
$$= \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

<https://semarangkab.bps.go.id>



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN SEMARANG 2021

Partisipasi Politik Penduduk Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020



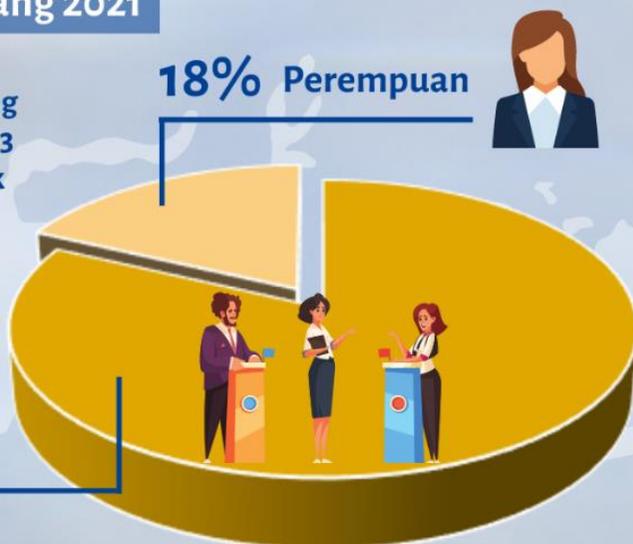
Anggota DPRD Kabupaten Semarang 2021

UU Nomor 8 Tahun 2012 pasal 58 dan 59 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 memberi mandat kepada partai politik untuk memenuhi **minimal 30 % keikutsertaan perempuan** dalam politik atau lembaga perwakilan rakyat

Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kabupaten Semarang **masih di bawah persentase** yang diharapkan



82% Laki-Laki



BAB III

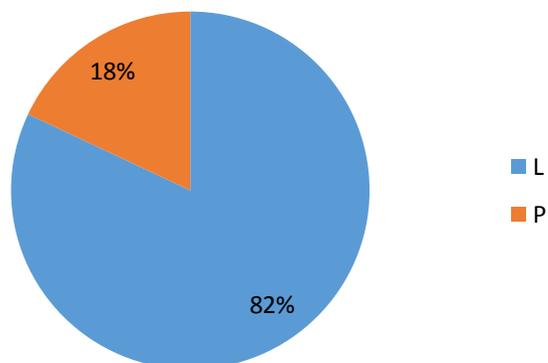
KONDISI POLITIK DI SEMARANG

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir dilakukan pada 2020 yaitu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Semarang tepatnya pada 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang 2020 adalah Nomor Urut 2, Ngesti Nugraha dan M. Basari dengan perolehan suara sebanyak 386.222 suara atau 67,1% dari total suara sah sebanyak 575.486 suara.

3.1. DPRD Kabupaten Semarang

DPRD Kabupaten Semarang tahun 2021 memiliki 50 anggota. Dari jumlah tersebut hanya ada 9 anggota perempuan dan 41 anggota Laki-laki. Persentase anggota DPRD Kabupaten Semarang tahun 2021 menurut jenis kelamin ditampilkan dalam gambar berikut :

Gambar 1. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2021 menurut Jenis Kelamin

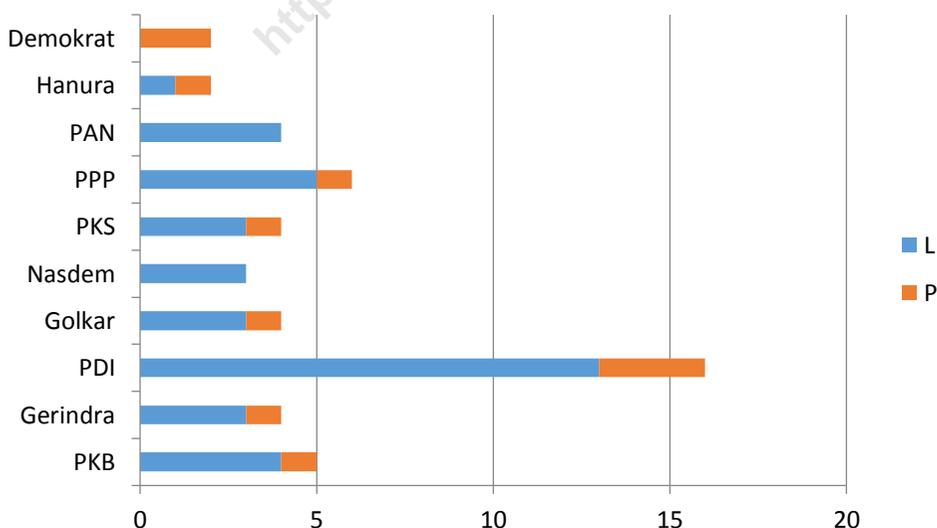


Persentase anggota DPRD Kabupaten Semarang perempuan hanya 22%, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Semarang masih dibawah persentase yang diharapkan sebesar 30%.

UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 58 dan 59 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 memberi mandat kepada partai politik untuk memenuhi minimal 30% keikutsertaan perempuan dalam politik atau lembaga perwakilan rakyat. Untuk pemilu yang akan datang keikutsertaan perempuan dari masing-masing partai politik harus lebih diperhatikan agar keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Semarang dapat memenuhi minimal 30% sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang merupakan wakil dari 10 Partai Politik. Berikut adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten Semarang berdasarkan jenis kelamin dan asal partai :

Gambar 2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2021 menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin



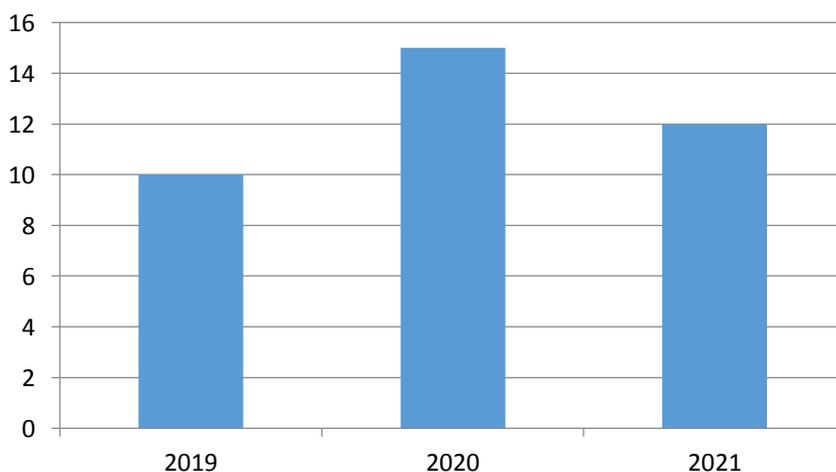
Sumber : KPU Kabupaten Semarang

Dari gambar diatas terlihat bahwa partai politik dengan keterwakilan perempuan paling banyak adalah Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Demokrat, dimana jumlah anggota DPRD perempuan masing-masing sebanyak 3 dan 2 orang. Partai yang tidak mempunyai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang adalah Partai Nasdem dan PAN.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD masih kurang karena keterwakilan perempuan pada masing-masing partai juga belum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Untuk DPRD hasil pemilu berikutnya keterwakilan perempuan dari masing-masing peserta pemilu dapat lebih diperhatikan.

Salah satu peran DPRD adalah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). DPRD Kabupaten Semarang pada tahun 2021 menghasilkan 12 Peraturan Daerah. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang menghasilkan 15 Peraturan Daerah (Perda). Perbandingan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Semarang dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

Dari jumlah peraturan daerah pada tahun 2021 hanya sekitar 8,3% yaitu sebanyak 1 perda yang merupakan inisiasi (prakarsa) DPRD Kabupaten Semarang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2020 dan 2019 dimana jumlah perda yang merupakan inisiasi (prakarsa) DPRD Kabupaten Semarang sebanyak 15 dan 10 perda.

3.2. Organisasi Masyarakat/LSM

Selain dalam bentuk partisipasi dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi politik masyarakat juga dapat dilakukan melalui Organisasi Masyarakat/LSM. Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Melalui organisasi diharapkan masyarakat dapat mengumpulkan aspirasinya untuk dapat disampaikan kepada pemerintah. Tanpa suatu organisasi, aspirasi dari satu orang akan sulit didengar oleh pemerintah. Organisasi masyarakat merupakan wadah aspirasi sekelompok masyarakat yang memiliki satu suara terhadap suatu kepentingan tertentu.

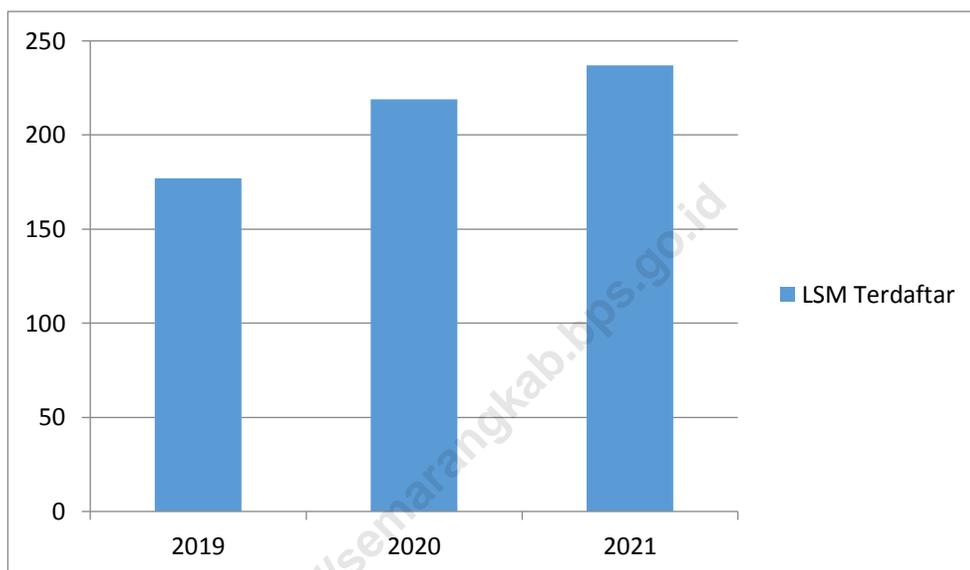
Organisasi masyarakat ini hampir sama dengan partai politik, tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar diantara organisasi masyarakat dan partai politik. Organisasi masyarakat berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (dalam waktu bersamaan) tanpa bertujuan memperoleh jabatan publik. Sedangkan partai politik tujuan utamanya menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik dan pemerintahan.

Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya. Semakin banyak Ormas/LSM yang produktif pada suatu daerah, maka semakin terbantu pula tugas dari pemerintahan daerah.



Jumlah Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Semarang tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021



Sumber : Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Semarang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang yang terdaftar tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 dan 2019. Peningkatan jumlah Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk membentuk Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat meningkat. Namun demikian, perlu dilakukan pembinaan terhadap ormas/LSM yang sudah terbentuk agar kegiatan organisasi tersebut lebih dioptimalkan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi anggota organisasi tersebut dan bagi masyarakat sekitar.

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN SEMARANG 2021

3 KEJADIAN TERBESAR DI KABUPATEN SEMARANG 2021



**PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

94 kasus

33.81%



**NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA**

59 kasus

21.22%



PENCURIAN

24 kasus

8.63%

BAB IV

KONDISI KEAMANAN DI KABUPATEN SEMARANG

Tingginya tuntutan hidup pada saat ini dan penurunan kondisi perekonomian memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Di samping itu, pesatnya teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (*short message service/SMS*) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, handphone, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan maupun kejahatan di luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas ada hal lain yaitu komposisi penduduk, dimana penduduk Indonesia merupakan penduduk yang sangat heterogen dimana komposisi penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak terkecuali penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Komposisi penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik, disamping itu jumlah personil keamanan (Polisi) turut juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan memudahkan dalam pengawasan kepada kondisi lingkungan.

Saat ini rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Isu-isu kejahatan saat ini mudah diterima oleh masyarakat, sehingga tingkat kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan meningkat. Menghadapi hal tersebut, seharusnya



pemerintah dalam hal ini kepolisian lebih berbenah untuk menghadapi gejala di masyarakat, agar kebutuhan masyarakat akan rasa aman dapat terpenuhi. Tugas polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat harus lebih ditingkatkan seiring tuntutan dari masyarakat.

4.1. Penduduk Kabupaten Semarang

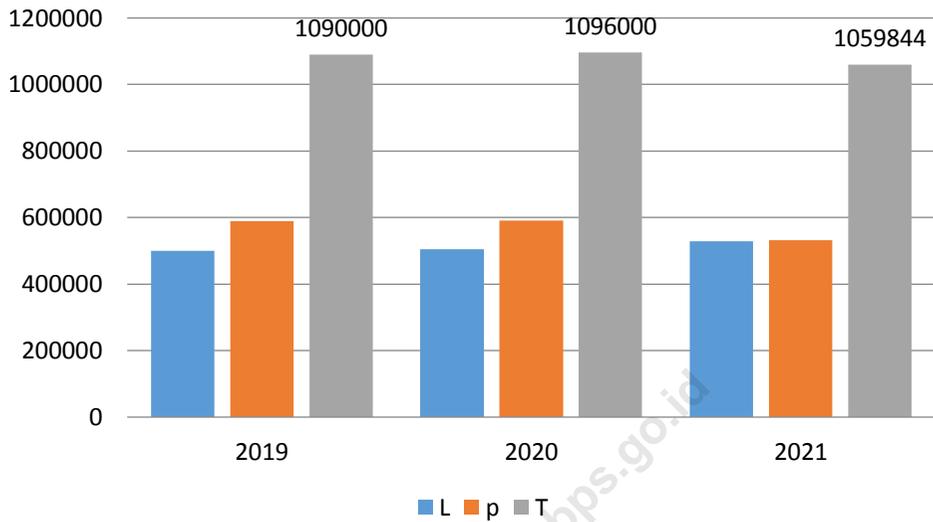
Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.019,27 km² yang dibagi menjadi 19 kecamatan dengan total desa/kelurahan 235 desa/kelurahan. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mempermudah urusan pemerintah dalam hal ini adalah urusan bersama.

Jumlah penduduk merupakan informasi awal yang penting sebelum mengetahui indikator-indikator keamanan yang erat kaitannya dengan jumlah penduduk. BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk melalui Sensus Penduduk. Sensus Penduduk yang terakhir dilakukan adalah Sensus Penduduk 2021, diantara sensus penduduk BPS juga melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir dilaksanakan tahun 2015. Berdasarkan hasil SUPAS 2015, BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk yaitu proyeksi penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang hasil proyeksi SUPAS 2015 menurut jenis kelamin tahun 2019-2021 dan persentase penduduk Kabupaten Semarang menurut jenis kelamin tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

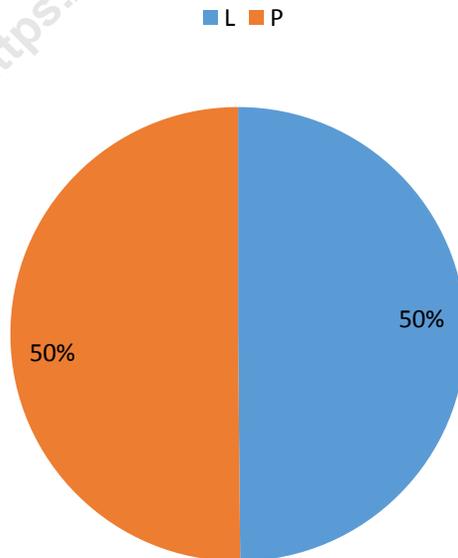


Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021



Sumber : 1. Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2015
2. Proyeksi Penduduk Hasil Interim (2020-2021)

Gambar 6. Persentase Penduduk Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

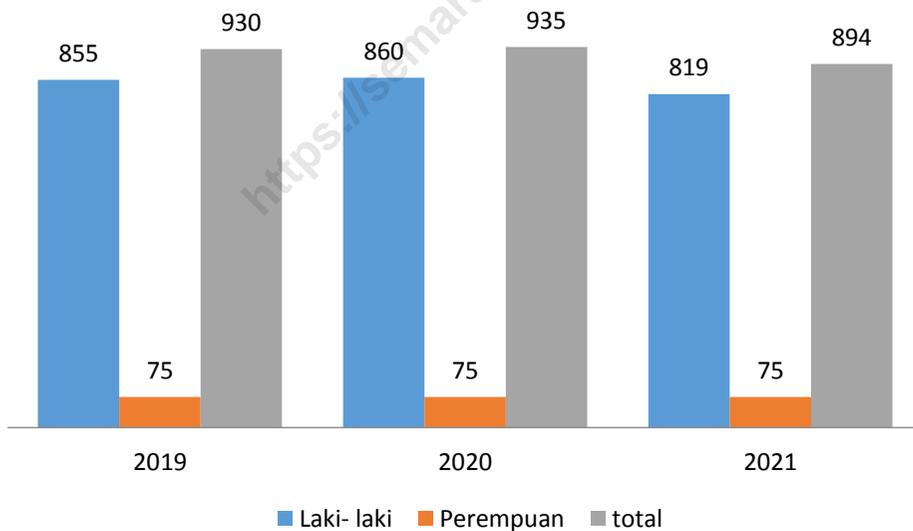


4.2. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Kondisi keamanan di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan di Kabupaten Semarang diantaranya adalah Polres, Polsek, dan jumlah pos polisi. Kabupaten Semarang memiliki satu Polres, 16 Polsek di setiap kecamatan masing-masing satu polsek, dan 8 pos polisi. Jumlah pos polisi di Kabupaten Semarang tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2019-2021 yaitu sebanyak 8 pos.

Selain fasilitas kantor polisi, kondisi keamanan juga dipengaruhi oleh jumlah personil keamanan yang ada. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Semarang dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 7. Jumlah Personil Polisi Kabupaten Semarang menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021



Sumber : Polres Semarang

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah personil polisi di Kabupaten Semarang tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, personil polisi di Kabupaten Semarang didominasi oleh laki-laki. Hal itu terlihat selama tahun 2019-2021. Jumlah

personil polisi wanita (Polwan) Tahun 2021 tidak mengalami penambahan ataupun penurunan dibanding tahun sebelum maupun sesudahnya.

Tugas polisi adalah melayani masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Semarang. Jumlah personil polisi di suatu wilayah hendaknya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani di wilayah tersebut. Jika proporsinya tidak ideal, maka tugas polisi sebagai pelayan masyarakat akan kurang optimal karena tidak semua masyarakat dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu, rasio penduduk per polisi menjadi salah satu indikator yang penting untuk diketahui terutama untuk pengambilan keputusan penempatan personil polisi di suatu wilayah.

Berikut ini adalah rasio penduduk per polisi di Kabupaten Semarang tahun 2019-2021 :

Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021



Sumber : Polres Semarang

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 satu orang personil polisi harus melayani kurang lebih 1186 penduduk. Rasio ini naik dibanding Tahun 2020 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa beban tugas polisi pada Tahun 2021 lebih berat dibanding Tahun 2020 dan 2019 karena

jumlah penduduk yang dilayani setiap personil bertambah. Jika beban tugas tersebut merupakan indikasi tingkat keamanan di Semarang, maka dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat keamanan di Kabupaten Semarang dari tahun 2019-2021. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah seharusnya diikuti oleh bertambahnya personil polisi yang bertugas di wilayah tersebut.

Selain itu, rasio penduduk per polisi di Kabupaten Semarang juga belum ideal, idealnya rasio polisi terhadap penduduk menurut PBB adalah 1:400 (Siregar, Sarah Nuraini dkk, 2015). Untuk mencapai rasio ideal tersebut perlu adanya tambahan personil polisi di Kabupaten Semarang menjadi dua kali lipat lebih dari jumlah personil yang ada saat ini.

4.3. Tindak Kejahatan di Kabupaten Semarang

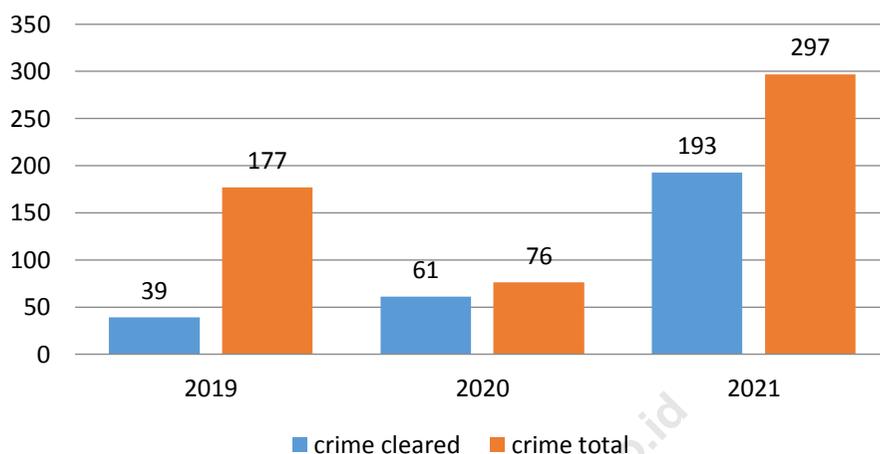
Jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian (*crime total*) di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sebanyak 297 kasus, jumlah tersebut naik dibanding tahun 2019, dan menurun dibandingkan tahun 2020. Jika jumlah kejahatan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan di suatu wilayah, maka dari hasil pencatatan kepolisian tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Semarang tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020.

Selain jumlah kejahatan yang tercatat di kepolisian, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*). Pada tahun 2021 polisi di Kabupaten Semarang berhasil menyelesaikan 193 kasus atau bertambah sekitar 3,16 kali lipat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan tahun 2020, jumlah ini naik dibanding tahun 2020 dan 2019 yaitu sebanyak 61 dan 39 kasus yang berhasil diselesaikan. Angka *crime cleared* ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja polisi.

Berikut adalah grafik jumlah kejahatan yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan di tahun 2019-2021 :



Gambar 9. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Kejahatan Diselesaikan (*Crime Cleared*) Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021



selain itu secara total perlu diperhatikan jumlah kejahatan secara lebih detil menurut jenis kejahatannya. Banyaknya kasus kejahatan di tahun 2019-2021 berdasarkan kelompok dan jenis kejahatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kejahatan yang Tercatat di Kabupaten Semarang menurut Kelompok dan Jenis Kejahatan Tahun 2021

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2021	
		Lapor	Selesai
Kejahatan terhadap Nyawa			
1	Pembunuhan	-	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
2	Penganiayaan Ringan (Anira)	15	12
3	Penganiayaan Berat (Anirat)	-	-
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	-
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
5	Perkosaan	3	3
6	Pencabulan	20	20

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2021	
		Lapor	Selesai
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
7	Penculikan	1	1
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
9	Pencurian dengan Kekerasan	7	6
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
12	Pencurian	24	15
13	Pencurian dengan pemberatan	94	20
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	21	12
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	1	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	1	1
17	Penadahan	2	2
Kejahatan Terkait Narkotika			
18	Narkotika dan Psikotropika	59	59
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi			
19	Penipuan/Perbuatan Curang	19	13
20	Penggelapan	11	9
21	Korupsi	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum			
22	Terhadap Ketertiban Umum	-	-

Sumber : Polres Semarang



Bila dilihat dari jenis kejahatannya, pada tahun 2021 tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Narkotika dan psikotropika, Pencurian, Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), dan Pencabulan. dengan Pemberatan (Curat) sejak tahun 2020 menduduki peringkat tertinggi jumlah kejahatan di Kabupaten Semarang. Jumlah kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang dilaporkan pada tahun 2021. Dari 94 kasus Curat yang dilaporkan pada tahun 2021 semuanya tidak berhasil diselesaikan pada tahun yang sama yakni hanya selesai sekitar 20 kasus. Kejahatan penggunaan narkotika dan psikotropika pada tahun 2021 menduduki peringkat kedua yaitu sebanyak 59 laporan kasus masuk. Kasus pencurian di tahun yang sama menduduki peringkat ketiga dengan jumlah laporan sebanyak 24 kasus. Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) pada Tahun 2021 menduduki peringkat keempat.

Untuk mencapai peningkatan kinerja kepolisian dan tingkat keamanan di Kabupaten Semarang, pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bekerja sama demi terwujudnya Kabupaten Semarang yang lebih aman dan dapat menekan jumlah kejahatan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Masyarakat juga diharapkan peduli dan segera melaporkan jika terjadi tindak kejahatan di lingkungannya, agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemerintah dalam hal ini juga diharapkan lebih aktif menghimpun informasi dari masyarakat terkait tindak kejahatan yang terjadi agar masalah keamanan masyarakat dapat dimonitoring dengan baik, dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan keamanan di Kabupaten Semarang.

4.4. Korban Kejahatan di Kabupaten Semarang

Selain jumlah kejahatan yang dilaporkan dan yang diselesaikan di Kabupaten Semarang, Polres Kabupaten Semarang juga mencatat jumlah korban kejahatan di Kabupaten Semarang berdasarkan kasus yang



ditangani. Informasi ini penting diketahui oleh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Berikut adalah tabel jumlah korban kejahatan di Kabupaten Semarang berdasarkan jenis kejahatan dan jenis kelamin tahun 2020-2021 :

Tabel 2. Jumlah Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2021

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2020		2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kejahatan terhadap Nyawa					
1	Pembunuhan	1	-	-	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan					
2	Penganiayaan Ringan (Anira)	9	6	15	12
3	Penganiayaan Berat (Anirat)	6	1	-	-
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Kesusilaan					
5	Perkosaan	-	-	-	3
6	Pencabulan	1	10	-	19
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang					
7	Penculikan	-	-	-	1
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan					
9	Pencurian dengan Kekerasan	1	8	4	3
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-	-	-	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang					
12	Pencurian	-	-	14	10

No	Kelompok/Jenis Kejahatan	2020		2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
13	Pencurian dengan pemberatan	-	-	85	19
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	-	-	14	7
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-	-	1	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-	-	1	-
17	Penadahan	-	-	2	-
Kejahatan Terkait Narkotika					
18	Narkotika dan Psikotropika	-	-	-	-
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi					
19	Penipuan/Perbuatan Curang	-	-	16	3
20	Penggelapan	-	-	7	4
21	Korupsi	-	-	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum					
22	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-

Sumber: Polres Semarang

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 kejahatan yang korbannya paling banyak adalah pencurian dengan pemberatan dengan jumlah korban 85 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Kejahatan lain yang korbannya cukup banyak adalah penipuan atau perbuatan curang dengan korban pada tahun 2021 sebanyak 16 laki-laki dan 3 perempuan. Posisi ketiga jenis kejahatan yang paling banyak korbannya adalah penganiyaan ringan dengan jumlah korban tahun 2021 sebanyak 15 laki-laki dan 12 perempuan, jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya dimana jumlah korban hanya 9 laki-laki dan 6 perempuan. Kemajuan teknologi seperti saat ini juga memungkinkan munculnya jenis-jenis penipuan baru yang memanfaatkan teknologi informasi seperti pesan lewat media sosial, SMS penipuan, maupun *website* undian berhadiah palsu. Masyarakat diharapkan

bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan seperti kejahatan penipuan ini.

Selain jenis kejahatan dengan jumlah korban paling banyak, jenis kejahatan lain yang perlu diperhatikan adalah kejahatan yang jumlah korban perempuan lebih banyak dibanding laki-laki dan jumlahnya meningkat signifikan. Hal ini mengingatkan kejahatan terhadap perempuan menjadi perhatian berbagai pihak baik pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun swasta melalui berbagai LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Kejahatan yang korban perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki adalah Perkosaan, Pencabulan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kejahatan ini perlu menjadi perhatian agar jumlah korban bisa ditekan untuk waktu yang akan datang, juga kejahatan-kejahatan lain yang juga harus selalu diwaspadai agar tidak terjadi lagi dengan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan Polri.



DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jalan Garuda No.7 Ungaran 50511; Telp./Fax. (024) 6921029
Website: semarangkab.bps.go.id; E-mail: bps3322@go.id